



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019

PT. BPR NGUNUT ARTA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertangungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ngundut Arta telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ngundut Arta posisi 31-12-2019 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.12.188.314 ribu sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.6.450.350 ribu Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Ngundut Arta selanjutnya.



2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Tata Kelola bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR

3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA

1 Transparency (Keterbukaan)

- adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi-informasi yang material dan relevan termasuk juga keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

2 Accountability

- yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

3 Responsibility

- adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan
- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku



4 Independency

- yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

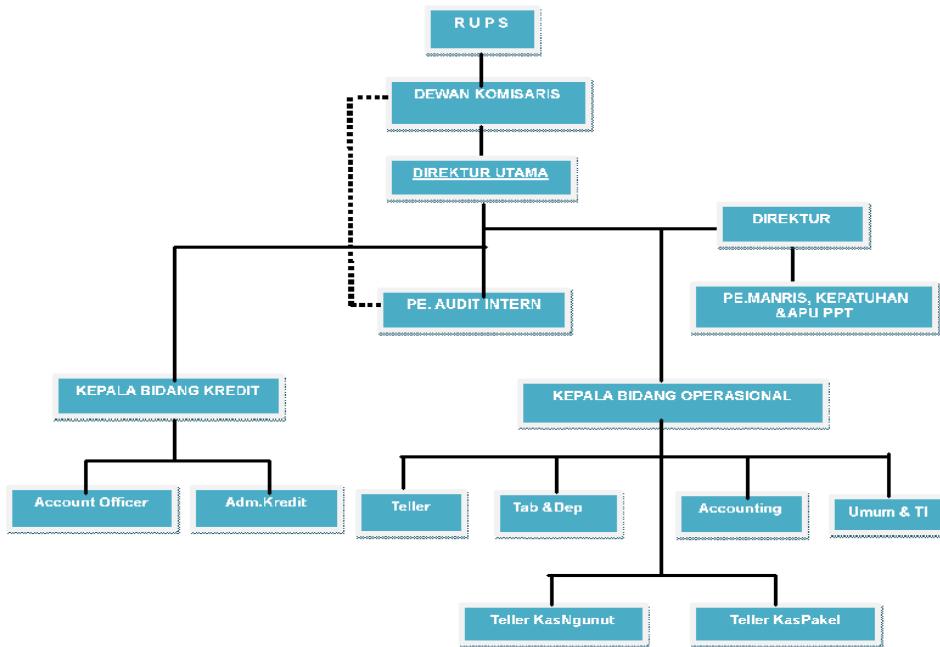
- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

4 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PT. BPR Ngunut Arta telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Ngunut Arta menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Ngunut Arta
2. PT. BPR Ngunut Arta berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ngunut Arta dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi



II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA



III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Ngunut Arta per 31-12-2019 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 88 tanggal 08 Nopember 2017 pada Notaris Sri Areni, SH, MM adalah sebagai berikut :



Nama	:	NING SUNINGKAT, SE
Jabatan	:	DIREKTUR UTAMA
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tulungagung, 24 Nopember 1964
Pendidikan Terakhir	:	Sarjana
Lama Jabatan	:	22 tahun
Sertifikasi Direksi	:	651001210632002016
Masalaku	:	21-11-2021
Pengalaman Kerja Terakhir	:	Direktur Utama PT BPR NGUNUT ARTA



Nama	:	Dra. KUSTIANI
Jabatan	:	DIREKTUR
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tulungagung, 15 Pebruari 1967
Pendidikan Terakhir	:	Sarjana
Lama Jabatan	:	4 tahun
Sertifikasi Direksi	:	65100121061582013
Masalaku	:	27-4-2023
Pengalaman Kerja Terakhir	:	Direktur PT BPR NGUNUT ARTA

Keterangan:

Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan surat persetujuan Nomor SR-8/KO.0402/2017 tanggal 04 Oktober 2017

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. DIREKTUR UTAMA

- a. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah di jalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur
- b. Menjaga keseimbangan likuiditas, permodalan, pendanaan dan perkreditan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan bank yang baik
- c. Memastikan bahwa penyaluran kredit sudah di jalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- d. Memelihara keharmonisan kerja antar bagian, menciptakan rasa aman dan nyaman di tempat kerja
- e. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
- f. Melaksanakan dan memimpin rapat bulanan untuk evaluasi kinerja operasional
- g. Melaksanakan survey ke tempat debitur, melakukan pembinaan kepada debitur jika di perlukan
- h. Menindiklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang di laksanakan oleh kantor Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Public dan Komisaris terhadap hasil laporan dari pemerisaan Audit Intern
- i. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan aset BPR



B. DIREKTUR

- a. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah di jalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur
- b. Membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- c. Membuat Rencana Kerja tahunan dan 5(lima) tahunan dengan persetujuan Direktur Utama dan di bawa dalam RUPS untuk mendapat persetujuan, selanjutnya akan di kirim kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan di gunakan sebagai pedoman BPR
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban Realisasi kerja tahunan dengan persetujuan Direktur Utama, di gunakan sebagai laporan RUPS
- e. Menerapkan Tata Kelola sebagaimana di maksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 pasal 2 Ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR dalam penyaluran dana dan penghimpunan dana
- f. Diskusi dengan Direktur Utama untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan

3. TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error untuk di evaluasi dan di mitigasi dengan memanfaatkan sarana yang ada
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan persaingan di pasar mikro, serta perkembangan Tehnologi Informasi Direksi telah berusaha untuk menyesuaikan perkembangan Tehnologi Informasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat marketing produk

4. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Ngunut Arta BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PROSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		PT. BPR Ngunut Arta	Tidak memeliki group usaha
1	NING SUNINGKAT, SE	Tidak ada	0%
2	Dra. KUSTIANI	Tidak ada	0%



5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	ANING SUNINGKAT, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Dra. KUSTIANI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	ANING SUNINGKAT, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Dra. KUSTIANI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PT. BPR Ngunut Arta per 31-12-2019 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 88 tanggal 08 Nopember 2017 pada Notaris Sri Areni, SH. MM adalah sebagai berikut :



Nama	:	HADY BANDONO NITIUTOMO
Jabatan	:	KOMISARIS UTAMA
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya/24-3-1954
Pendidikan Terakhir	:	Diploma Tiga
Lama Jabatan	:	22 tahun
Sertifikasi Komisaris	:	651001210601392016
Masalaku	:	2-3-2021
Pengalaman Kerja Terakhir	:	Komisaris Utama PT. BPR NGUNUT ARTA



Nama	:	AHMAD TRI WAHYUDI
Jabatan	:	KOMISARIS
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang/14-4-1966
Pendidikan Terakhir	:	Sarjana
Lama Jabatan	:	3 tahun
Sertifikasi Komisaris	:	65100120619552016
Masalaku	:	8-11-2021
Pengalaman Kerja Terakhir	:	Komisaris PT. BPR NGUNUT ARTA



Keterangan:

Seluruh anggota Dekom PT. BPR Ngunut Arta telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - i. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - ii. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
3. **REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI**
- a. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
 - b. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang



- c. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
 - d. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
- 4. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS**
- Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Ngunut Arta dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PROSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	
		PT. BPR Ngunut Arta	Tidak memiliki group usaha
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	15%	0%
2	AHMAD TRI WAHYUDI	Tidak ada	0%

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

a. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	AHMAD TRI WAHYUDI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

b. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan keluarga
2.	AHMAD TRI WAHYUDI	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Ngundut Arta posisi 31-12-2019 , dapat di informasikan bahwa modal inti PT. BPT Ngundut Arta adalah sebesar Rp 6.450.350 ribu sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite

VI. PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Ngundut Arta yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN
			(Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	408.000
2	Tunjangan	2	107.686
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimadidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Mobil Dinas
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	515.686



2. PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	246.000
2	Tunjangan	2	39.937
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	285.937

VII. RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-20172019 di PT. BPR Ngunut Arta adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,96	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,72	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,56	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,72	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	4,34	1,00



VIII. FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARA KAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN-TASE KEHADIR-AN
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	KOMISARIS UTAMA	4	4	0	100%
2	AHMAD TRI WAHYUDI	KOMISARIS	4	4	0	100%

Keterangan:

PT. BPR Ngunut Arta telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

Tri wulan I

- Realisasi posisi per akhir Pebruari 2019 , realisasi pencapaian KYD, Tabungan, Deposito , Pendapatan Operasional, Laba tahun berjalan dan asset rata rata pencapaianya 96,88%, KYD terhadap target tercapai sebesar 97,90% dan di bandingkan dengan Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 9,60% , maka dari itu untuk mempercepat pertumbuhan kredit disarankan untuk melakukan terobosan baru dengan cara meningkatkan promosi dengan melalui banner/spanduk pada tempat usaha debitur, referensi perangkat desa, sahabat lama bank, ataupun pemasaran melalui media sosial sehingga nantinya diharapkan target bisa tercapai dan realisasi kredit melebihi yang di targetkan serta penyalurannya terlebih di utamakan ke jenis penggunaan usaha-usaha yang produktif yaitu modal kerja.



- Untuk target pertumbuhan Tabungan tercapai sebesar 107,16% dan Deposito sebesar 94,05% pencapaian ini berakibat pada pencapaian ratio BOPO sebesar 80,65% sudah melampaui Risk Apposite dan Risk Tolerance maksimal 75%, oleh sebab itu manajemen di harapkan dapat melakukan efisiensi biaya biaya yang di rasa perlu , supaya tidak melampaui batasan maksimal ratio BOPO
- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara keseluruhan adalah sehat, hanya untuk ratio LDR yang sebesar 77,65% untuk segera di tingkatkan karena outstandingnya terus mengalami penurunan untuk itu perlu melakukan inovasi baru
- hal hal lain, tentang teknologi Informasi perlu merencanakan adanya kaderisasi dan tenaga-tenaga kerja muda yang lebih bisa mengikuti perkembangan IT

Triwulan ke II

- Pemenuhan Modal Inti sesuai dengan POJK No. 5/POJK.03/2015 yaitu sebesar 6 milyar sudah terpenuhi yang terdiri dari Modal Disetor, cadangan umum, laba tahun lau dan 50% dari laba tahun berjalan
- Untuk transaksi APU dan PPT telah dilakukan pengelompokan risiko secara CDD dan sampai triwulan II transaksi APU -PPT semua transaksi dalam kelompok risiko rendah
- Untuk pertumbuhan kredit terlihat LDR meningkat menjadi 83,97% dari triwulan I , posisi ini agar di pertahankan karena outstanding tiga bulan sebelumnya mengalami penurunan dan juga perlu di tingkatkan untuk mengejar target pertumbuhan kredit.
- Pada triwulan ke dua NPL Netto sebesar 4,10% dan tidak ada perubahan untuk kredit kualitas macet, masih dengan debitur yang sama hal ini agar menjadi perhatian management agar petugasnya melakukan penagihan secara rutin dan kontinue sehingga NPL di harapkan bisa turun , dan kredit macet agar di lakukan tindakan pelelangan lagi



Triwulan III

- Realisasi pencapaian target rencana kerja pada triwulan III secara keseluruhan sudah cukup baik, pertumbuhan kredit yang di berikan tercapai sebesar 114,50% dari target yang di rencanakan, dan di bandingkan dengan posisi Desember mengalami pertumbuhan sebesar 17,18% , sementara target tabungan tercapai sebesar 88,50% dan deposito tercapai 73,90%, pencapaian penggalian dana meskipun di bawah 100% namun masih mampu mendukung likuiditas bank dalam penyaluran kredit

Triwulan IV

- Pembahasan Rencana Bisnis untuk periode mendatang yang di susun harus memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat
- Meningkatkan pelayanan dengan sarana dan prasarana untuk pelayanan prima kepada nasabah sehingga mampu melayani nasabah baik kreditur maupun debitur dengan baik. Penataan dan penyempurnaan serta pengembangan jaringan usaha/operasional kantor yang optimal
- Penyaluran kredit agar di pertahankan dan di tingkatkan , serta mengutamakan ke jenis penggunaan usaha-usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja
- mengelola likuiditas dan menjaga LDR yang ideal dan fokus pada strategi penghimpunan dana yang low cost funding seperti tabungan dan deposito Pengembangan SDM dan organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan BPR, selain itu perlu untuk meningkatkan skill dan kualitas SDM dengan rencana pendidikan dan pelatihan
- Senantiasa menjaga rasio keuangan dan terjaganya Tingkat Kesehatan Bank sehingga BPR dapat terus berkembang secara prudent dan senantiasa menjalankan prosedur sesuai ketentuan



IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2019 di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2019 yang terjadi di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2019 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Ngunut Arta, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.



XI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Ngunut Arta memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2019 di PT. BPR Ngunut Arta dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:

Dalam tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Ngunut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR



7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan Fungsi Kepatuhan yang di laksanakan di PT. BPR NGUNUT ARTA sampai dengan posisi 31-12- 2019 antara lain :

1. Melakukan pengkinian data base ketentuan yang berlaku
2. Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit
3. Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada unit kerja terkait
4. Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan
5. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip kehati hatian, seperti KPMM (kewajiban Penyediaan Modal Minimum), BMPK (Batas Maksimal Pemebrian Kredit) dan NPL (Non Performig Loans) sepanjang tahun 2019 secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip kehati-hatian
6. Melakukan review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan
7. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR
9. Menyediakan informasi peraturan OJK, BI dan peraturan perundang- undangan lainnya yang mudah di akses oleh karyawan



INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2019

1. Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan Otoritas pengawas lainnya telah di penuhi dengan baik
2. Ratio NPL Net 3,34% berada dalam batas aman yang di perkenankan ketentuan yang berlaku maksimal 5% (Net)
3. Ratio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah sebesar 114,58% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%
4. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Ngundut Arta telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen



Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Ngunut Arta sampai dengan posisi 31-12-2019 meliputi:

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat dan Kantor Kas dan seluruh bagian
2. Melaksanakan audit terhadap proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
3. Memperbarui rencana strategis audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

1. Sesuai Keputusan RUPS PT. BPR Ngunut Arta penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya di lakukan oleh Dewan Komisaris
2. Akuntan Publik yang di tunjuk oleh PT. BPR untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik di lakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang di tunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid untuk melakukan audit atas laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019
4. Laporan Keuangan PT. BPR Ngunut Arta telah di audit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama



Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Ngundut Arta dalam 3(tiga) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2019	THUFAN DAN ROSYID	103.00/GA-NA.19/TNR-TP/X/19	23-01-2020 s.d 23-03-2010	Terdaftar di OJK
2018	MADE SUDARMA THOMAS &DEWI	PAU-856/MTD/MLG/XII/2018	10-1-2019 s.d. 10-3-2020	Terdaftar di OJK
2017	MADE SUDARMA THOMAS &DEWI	PAU.689/MTD/MLG/XI/2017	31-1-2018 s.d. 30-4-2019	Terdaftar di OJK

3. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membawahi kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab APU-PPT

Tugas dan tanggung jawab APU-PPT adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya yang terkait dengan penerapan APU-PPT telah dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik oleh frontliners.
2. Pejabat Eksekutif APU-PPT menjalankan tugas pemeriksaan dokumen/checklist dengan baik dan menyeluruh.
3. Memberikan pertimbangan secara obyektif atas penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon nasabah/WIC yang tergolong beresiko tinggi.
4. Memastikan profil nasabah tersimpan dengan lengkap dan akurat serta dapat digunakan sewaktu-waktu untuk proses verifikasi.
5. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait terhadap penemuan transaksi keuangan yang mencurigakan.
6. Memberikan usulan perbaikan terhadap sistem APU-PPT kepada direksi
7. Memantau dan memelihara Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diberikan oleh OJK atau melalui informasi yang tersedia di media massa.



8. Memeriksa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan direksi.
9. Memastikan segala bentuk pelaporan ke instansi terkait, seperti OJK, BI, dan PPATK berjalan tepat waktu dan lengkap.
10. Memantau perubahan dan perkembangan peraturan di ranah pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
11. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan yang terkait bagiannya.

4. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Ngundut Arta

telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko



Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Ngunut Arta mencakup:

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Risk Appetite bulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
2. Menyusun dan meyampaikan Laporan Profil Risiko semester II tahun 2019 untuk di sampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan
3. Menyusun dan menyampaikan Standart operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko pada semester I tahun 2019

XIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	4	113.889
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	278	10.467.597
	Jumlah	282	10.581.486

Keterangan:

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Ngunut Arta

XIV. RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Ngunut Arta senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Ngunut Arta menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang



Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

1. Target pertumbuhan Kredit yang di berikan sebesar 12,11% dari realisasi tahun 2019, dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 104,46% terhadap Rencana Bisnis Bank
2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 11,58%
3. Modal Inti sudah tercapai sebesar 6 miliar dalam pos Modal Disetor, Cadangan Umum dan laba tahun lalu

XV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Nguntut Arta telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

PT. BPR NGUNUT ARTA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi . Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.



3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR NGUNUT ARTA menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

1. PT. BPR Ngundut Arta telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Ngundut Arta secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Ngundut Arta pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui website dan media sosial seperti Instagram
2. Selain itu, PT. BPR Ngundut Arta menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI. PEMERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Ngundut Arta aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Jalan Sehat berhadiah dalam rangka hari jadi BPR/BPRS	Edukasi dan Literasi tentang BPR/BPRS	1.725	Masyarakat Kediri
2	Bantuan kebutuhan pokok	Peningkatan kesejahteraan Masyarakat	800	UMKM di desa Karanggongso Prigi Trenggalek



XVII. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2019

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,90	Baik

Hasil Self Assessment penerapan Tata Kelola tahun 2019 secara umum “BAIK”. hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain :

1. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang di dukung dengan struktur yang lengkap
2. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang di hasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif yang didukung dengan struktur yang lengkap
3. Jumlah SDM khususnya Account Officer masih kurang hal ini dikarenakan jumlah aset bank yang masih belum besar.

Walaupun secara keseluruhan hasil self assessment Tata Kelola tahun 2019 tergolong “Baik” namun dalam pelaksanaannya masih di perlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan atas segala kelemahan dan kekurangan yang di temukan. Sejalan dengan pengembangan usahanya, bank akan tetap berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan serta akan melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan di setiap aspek Tata Kelola



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

XVIII. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ngunut Arta. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ngunut Arta, Terima Kasih.

Tulungagung, 18 Juni 2020
Pengurus PT. BPR Ngunut Arta


HADY BANDONO NITIUTOMO
KOMISARIS UTAMA



ANING SUNINGKAT, SE
DIREKTUR UTAMA